

## PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AGGRESSIVENESS*

Bayu Agung Pranoto<sup>1</sup> dan Ari Kuncoro Widagdo<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Sebelas Maret  
email: agungpranoto7@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Sebelas Maret  
email: widagdo2002@yahoo.com

### *Abstract*

*This research aims to examine the influence of political connection and corporate governance on tax aggressiveness. Data of this research is secondary data obtained from the annual report. Sampling procedure is purposive sampling producing 175 listed companies in period 2006-2014. Method of analysis is multiple regression analysis. The test result showed that the political connection take negative effect to tax aggressiveness, especially variable independent board. While corporate governance has no effect on tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Political Connection, Corporate Governance, Tax Aggressiveness*

### 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan denyut nadi pembangunan suatu negara. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 70% pendapatan APBN bersumber dari penerimaan Pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba sebelum pajak. Dengan demikian, perusahaan sering kali berupaya untuk melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perusahaan harus meminimalkan biaya guna memperoleh laba yang tinggi. Namun, di sisi lain perusahaan mempunyai kewajiban melaksanakan semua peraturan perpajakan dengan baik dan benar. Untuk mencapai dua kepentingan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tindakan pajak agresif (*tax aggressiveness*). *Tax aggressiveness* merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (Frank, 2009). *Tax aggressiveness* dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang masih dalam memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*). Hal ini berbeda dengan *tax evasion*. *Tax evasion* dilakukan dengan cara yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*). *Tax aggressiveness* mengarah pada usaha mengurangi pajak secara legal dengan diikuti pengungkapan informasi penuh kepada otoritas pajak. Praktek tindakan agresif biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Chen (2010) menyatakan bahwa penggunaan istilah *tax aggressiveness* dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

*Tax aggressiveness* telah menjadi masalah sejak awal peraturan perundang-undangan pajak dan hal ini lazim terjadi dalam setiap masyarakat di mana pajak dipungut (Andreoni, Erard & Feinstein, 1998). Bagi perusahaan dan pemegang saham, pajak merupakan komponen biaya yang signifikan, sehingga muncul keinginan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Hanlon & Slemrod, 2009). Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan, secara teori, faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam mematuhi pajak adalah tarif pajak, kemungkinan terdeteksinya penghindaran pajak, hukuman, denda dan tidak mau mengganggu risiko. Swingly (2015) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah karakter eksekutif dan ukuran perusahaan. Dyreng (2010) menyatakan bahwa salah satu hal yang bisa mempengaruhi keputusan *tax aggressiveness* adalah karakter eksekutif. Li (2015) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik kuat mempunyai beban pajak yang lebih rendah. Sementara, Zhang (2012) menyatakan bahwa perusahaan yang dimiliki pemerintah dan berkoneksi politik mempunyai tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan yang tidak dimiliki pemerintah.

Penelitian mengenai koneksi politik dan *tax aggressiveness* telah beberapa kali dilakukan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness* (Adhikari, 2006; Richter *et al.*, 2009; Brown *et al.*, 2014; Kim and Zhang, 2015). Giroud (2013) menyatakan tidak ada pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Sementara, Zhang (2012) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Pada satu sisi, koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak yang dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan. Hal ini seperti terjadi pada bidang perbankan dalam memperoleh pinjaman atau dana talangan (Faccio *et al.*, 2006; Chiu and Joh, 2004; Johnson and Milton, 2003). Koneksi politik dapat juga digunakan untuk membantu mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi dengan pemerintah (Li *et al.*, 2012). Namun, pada sisi lain adanya koneksi politik juga memberikan manfaat akan pembayaran pajak yang lebih besar kepada pemerintah. Zhang *et al.* (2012) menyatakan bahwa direktur utama suatu perusahaan BUMN dievaluasi oleh pemerintah, di mana pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan salah satu pertimbangan evaluasi tersebut. Selain itu, hal ini juga merupakan citra yang baik bagi seorang direktur utama dengan membayar pajak yang besar (Zhang, 2012). Dengan demikian, perusahaan BUMN akan berusaha untuk membayar pajak besar kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara yang pada akhirnya membuat direktur utama tersebut tetap dipertahankan menjadi direktur utama atau promosi ke perusahaan BUMN yang lebih besar serta mempertegas legitimasi politiknya.

Koneksi politik sering terjadi di negara-negara berkembang dengan perlindungan hak milik lemah, termasuk salah satunya di Indonesia (Fisman, 2001). Pada negara Indonesia, koneksi politik sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Umumnya adalah dengan menempatkan orang yang mempunyai kedekatan dengan pemerintah ke dalam struktur organisasi perusahaan, baik komisaris maupun direksi. Hal ini sering terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pengisian sejumlah komisaris BUMN yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah sudah dilakukan sejak rezim presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang berlangsung dari tahun 2004 hingga 2014. Koneksi politik juga tampak jelas pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan mengangkat komisaris BUMN yang berasal dari partai politik ataupun relawan untuk menduduki jabatan sebagai komisaris BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan hal yang umum terjadi dalam struktur organisasi perusahaan BUMN di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah juga menyadari bahwa pemilihan direksi maupun komisaris juga memperhatikan keahlian dan kompetensi dari pihak yang menduduki jabatan tersebut serta melakukan uji dan kelayakan untuk menduduki suatu posisi dalam organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan agar BUMN tersebut berkontribusi positif bagi negara. Salah satu kontribusi yang diinginkan adalah melalui pembayaran pajak kepada negara. Direktorat Jenderal Pajak juga mengapresiasi setoran pajak yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dengan memberikan penghargaan bagi BUMN pembayar pajak terbesar. Hal ini tentu juga menjadi citra yang positif bagi para pejabat di suatu BUMN yang semakin menguatkan koneksi politiknya.

Konsep *corporate governance* (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah *listing* di BEI. Oleh karena itu sangat penting bagi manajemen untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Perkembangan *corporate governance* pada perusahaan akhir-akhir ini menunjukkan *trend* yang sangat baik dimana hampir seluruh perusahaan telah menerapkannya. *Corporate governance* sendiri merupakan suatu aturan yang akan menghasilkan suatu kepercayaan antara pemilik (*principal*) dengan (*management*) dan nantinya pemilik akan percaya atas seluruh kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen.

*Corporate governance* dalam suatu perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien dimana dalam mekanisme *corporate governance* telah diatur penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang, namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. Kinerja perusahaan yang baik dapat diukur dengan laba yang diperoleh perusahaan, laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (*sustainable earnings*) di masa depan.

Pencapaian laba perusahaan tidak luput dari pemilihan keputusan yang tepat dalam melakukan kegiatan perusahaan. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tarif pajak efektif. Besaran tarif pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung

dari pemegang saham perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan *corporate governance* yang baik, maka akan tercipta kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian *corporate governance* dan *tax aggressiveness* di Indonesia pernah dilakukan oleh Utami (2014) yang meneliti tentang pengaruh organ-organ pendukung *good corporate governance* terhadap *tax aggressiveness* di mana terdapat pengaruh yang signifikan antara komite audit, eksternal audit dan manajemen risiko terhadap *tax aggressiveness*. Hanum (2013) juga menemukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap *effective tax rates* yang merupakan proksi dari *tax aggressiveness*. Annisa (2012) menemukan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 *Tax aggressiveness*

*Tax aggressiveness* merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak (Dyreng, 2008). Praktek *tax aggressiveness* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Chen (2010) menyatakan bahwa penggunaan istilah *tax aggressiveness* dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pada dasarnya, wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Hal inilah yang membuat wajib pajak melakukan penghindaran pajak, baik bersifat legal maupun ilegal. Penghindaran pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance* atau *tax aggressiveness*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat ilegal adalah penyelundupan pajak (*tax evasion*). Menurut Anderson (2003), penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah penyelundupan yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan *tax aggressiveness* adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundangan-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.

#### 2.1.2. *Corporate governance*

Thomas (2006) menyebutkan bahwa *good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Konsep ini menekankan pada dua hal, Pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Esensi dari *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Rizqiasih, 2010).

#### 2.1.3. Koneksi Politik

Menurut Gomez dan Jomo (2009), perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah dapat diartikan sebagai perusahaan milik pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Konglomerat (pemilik) yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah adalah konglomerat atau pemilik perusahaan merupakan tokoh politik terkemuka (Gomez dan Jomo, 2009). Tokoh politik tersebut merupakan anggota dewan di pemerintahan pusat atau yang merupakan anggota partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Leuz and Gee, 2006).

Faccio (2006) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Adhikari *et al.*, 2006).

Koneksi politik dapat memberikan dampak pada dua sisi bagi nilai perusahaan. Hal tersebut dapat meningkatkan atau justru membahayakan nilai perusahaan. Fan *et al.*, (2004) melaporkan hasil penelitian bahwa perusahaan yang memiliki CEO berkoneksi politik memiliki kinerja lebih rendah sekitar 37%

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik apabila diukur dengan *stock return* perusahaan mereka tiga tahun pasca IPO.

Keuntungan lain yang di dapat oleh perusahaan yang berkoneksi politik adalah akses yang lebih mudah untuk pembiayaan hutang, pajak yang lebih rendah, dan kekuatan pasar yang lebih kuat. Zhang, *et. al.*, (2010) memberikan contoh dari hasil laporan penelitiannya bahwa bankir sering dipaksa untuk memberikan pinjaman bagi proyek-proyek yang dilakukan oleh perusahaan yang berkoneksi politik meskipun proyek tersebut diperkirakan tidak menguntungkan.

#### 2.1.4. Komisaris Independen

Komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan *corporate governance* karena keberadaan dewan komisaris belum dapat memberikan jaminan terlaksananya prinsip-prinsip *corporate governance*, khususnya mengenai perlindungan terhadap *investor*. Untuk mendorong implementasi *corporate governance*, dibentuk sebuah organ tambahan dalam struktur perseroan. Organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia (Hanum, 2013). Organ-organ tambahan tersebut antara lain adalah komisaris independen dan komite audit.

Komisaris independen idealnya merupakan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan tersebut. Dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat terjadinya keseimbangan dalam perusahaan antara manajemen perusahaan dan para *stakeholder*-nya.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Agensi

Pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost*. Aktivitas pengawasan dapat berupa kontrak perjanjian yang dibuat antara prinsipal dan agen. Sedangkan *agency cost* itu sendiri adalah ongkos atau resiko yang terjadi ketika seseorang (*principal*) membayar seseorang (*agent*) untuk menjalankan sebuah tugas, padahal *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang selalu meningkat. Sedangkan *agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sesuai dengan pernyataan Eisenhardt (1989) yang menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 1). Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); 2). Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*); 3). Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia juga akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent* (Nasution dan Doddy, 2007). Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*. Hal ini memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.

Pada penelitian ini, teori agensi menjelaskan bahwa adanya konflik yang akan timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan termasuk perusahaan-perusahaan pemerintah yang telah *listing* di BEI. Konflik tersebut terjadi ketika pemilik utama perusahaan tersebut adalah *fiskus* (pemerintah) sekaligus pembuat regulasi dalam hal perpajakan sementara disisi lain terdapat pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak. Pihak *fiskus* yang merangkap sebagai pembuat regulasi berharap akan adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari sektor pajak sementara pada pihak manajemen terdapat pandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan menghasilkan beban pajak yang rendah.

Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut dapat menyebabkan adanya konflik antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen perusahaan.

### **2.2.2. Political Favoritism Effect dan Bureaucratic Incentive Effect**

Zhang (2012) menjelaskan hubungan antara koneksi politik dan *tax aggressiveness* dapat berupa dua sisi. Zhang (2012) meneliti tentang hubungan koneksi politik dan *tax aggressiveness* di negara Cina. Koneksi politik yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan BUMN bisa membantu perusahaan-perusahaan tersebut untuk melakukan lobi dengan pemerintah, termasuk melobi badan perpajakan di negara Cina. Hal ini bisa dilakukan oleh eksekutif yang memiliki koneksi politik kuat untuk mempengaruhi pemerintah, dalam hal ini badan perpajakan untuk menghindari pemeriksaan pajak, mengurangi denda ataupun tindakan lain yang tergolong *tax evasion* atau *tax aggressiveness* secara ilegal. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Faccio *et al.* (2006) di mana perusahaan seringkali mendapat pinjaman dari bank pemerintah ataupun mendapat dana talangan dari pemerintah saat perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan dengan menggunakan koneksi politik yang kuat. Hal semacam ini, di mana koneksi politik memberikan pengaruh semakin tinggi terhadap tindakan *tax aggressiveness* disebut dengan *political favoritism effect*.

Di sisi lain, juga terdapat hubungan yang berbeda antara koneksi politik dengan *tax aggressiveness*. Pendapat ini menyatakan bahwa eksekutif di BUMN, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, ditetapkan dan dievaluasi oleh pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pajak terhadap negara. Selain itu, di negara Cina, pemerintah memberikan penghargaan terhadap pembayar pajak tertinggi bagi BUMN. Hal yang sama terjadi pula di Indonesia. Dengan adanya hal ini ditambah dengan sorotan media yang memberikan citra positif terhadap pencapaian itu, maka hal ini akan memotivasi eksekutif untuk berkontribusi secara maksimal kepada negara dengan pembayaran pajak yang besar kepada negara. Hal ini dapat diartikan bahwa koneksi politik memberikan pengaruh semakin rendah terhadap tindakan *tax aggressiveness*. Hal semacam ini disebut dengan *bureaucratic incentive effect*.

## **2.3. Pengembangan Hipotesis**

### **2.3.1. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Aggressiveness**

Koneksi politik dapat memberikan akibat positif maupun negatif terhadap *tax aggressiveness*. Pada satu sisi, koneksi politik dapat berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*. Koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak yang dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan seperti menghindari audit pajak (Adhikari, 2006; Richter *et al.*, 2009; Brown *et al.*, 2014; Li, 2015; Kim and Zhang, 2015). Di sisi lain, koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Eksekutif di BUMN, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, ditetapkan dan dievaluasi oleh pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pajak terhadap negara (Zhang, 2012). Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan terhadap pembayar pajak tertinggi bagi BUMN (Zhang, 2012). Dengan demikian, perusahaan BUMN akan berusaha untuk membayar pajak besar kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara yang pada akhirnya membuat direktur utama tersebut tetap dipertahankan menjadi direktur utama atau promosi ke perusahaan BUMN yang lebih besar serta mempertegas legitimasi politiknya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>** : Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*.

### **2.3.2. Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Aggressiveness**

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness*. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chai dan Liu; Kim, Li dan Li (2010); Ralf dan Chatelain (2010); Annisa (2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Perusahaan yang telah menerapkan *corporate governance* diharapkan akan berdampak baik dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik, efektif, dan efisien. Ketika perusahaan berhasil dalam melaksanakan *corporate governance* secara efektif maka akan berdampak pada kinerja perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para *stakeholders* termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif serta menaati peraturan pajak yang berlaku. *Corporate governance* yang baik dapat menurunkan *agency problem* yang muncul, sehingga manajer sebagai agen berusaha untuk mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan sehingga hal ini dapat menurunkan *tax aggressiveness*. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut.

$H_2$  : *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*.

### 2.3.3. Pengaruh Interaksi Antara *Corporate Governance* dengan Pengaruh Politik dari Aspek Komisaris Independen

Penelitian mengenai kemungkinan interaksi antara *corporate governance* dengan pengaruh politik dari aspek komisaris independen terhadap *tax aggressiveness* masih belum dilakukan. Hal ini diperlukan karena ketidakkonsistenan hasil penelitian pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Pengaruh interaksi ini penting ketika suatu perusahaan dimiliki oleh pemerintah dengan komisaris independen yang memiliki koneksi politik dengan penerapan *corporate governance* yang efektif. Pengaruh interaksi ini dirasa akan lebih karena didorong oleh hubungan dengan pemerintah, di mana pemerintah melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dari segi kontribusi bagi negara serta tuntutan bagi komisaris independen untuk berkinerja lebih baik demi memperkuat kondisi politiknya. Selain itu, perusahaan juga dituntut untuk melakukan praktek *corporate governance* yang efektif sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. *Corporate governance* yang dilakukan secara efektif maka akan berdampak pada kinerja perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para *stakeholders* termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif serta menaati peraturan pajak yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. *Corporate governance* yang baik dapat menurunkan *agency problem* yang muncul, sehingga manajer sebagai agen berusaha untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perpajakan sehingga hal ini dapat menurunkan *tax aggressiveness*.

Ding (2014) melakukan penelitian mengenai interaksi antara pengaruh politik dari aspek kepemilikan pemerintah dengan pengaruh politik dari aspek manajemen terhadap kinerja, menunjukkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh non pemerintah, dengan *board chair* terhubung politik tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sebaliknya, ketika perusahaan dikendalikan oleh pemerintah, dengan *board chair* terhubung politik memiliki pengaruh dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja diukur salah satunya dari pencapaian laba, di mana hal ini akan berpengaruh pula terhadap pajak yang disetorkan. Dapat disimpulkan dalam kasus interaksi bahwa pengaruh politik terhadap kinerja perusahaan, tergantung dari jenis kepemilikan.

Desai Dharmapala (2006) menemukan bahwa pengaruh kompensasi manajemen terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan berbeda antara perusahaan yang memiliki praktek *corporate governance* yang baik dengan yang memiliki praktek *corporate governance* buruk. Hal ini menunjukkan bahwa praktek *corporate governance* dapat membuat perbedaan pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Komisaris independen penting dalam penerapan *corporate governance* yang efektif. Komisaris independen bertugas untuk menjaga manajemen agar dalam menjalankan kegiatannya tidak bertentangan dengan hukum maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hanum (2014) menyatakan bahwa organ dalam *corporate governance* yaitu komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Dengan adanya interaksi antara *corporate governance* serta komisaris independen yang memiliki koneksi politik diharapkan akan membuat perusahaan lebih menaati peraturan yang ditetapkan, salah satunya peraturan mengenai perpajakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut.

$H_3$  : Pengaruh negatif *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness* akan lebih kuat pada perusahaan dengan komisaris independen yang mempunyai koneksi politik.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan *corporate governance* yang terdaftar di BEI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Metode kuantitatif merupakan metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiono, 2013). Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Sugiono, 2013).

### 3.2 Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel

#### 3.2.1. Data

Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian (Sekaran, 2006).

Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel selama 2006-2014. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai *effective tax rates*, skor indeks *corporate governance*, profil susunan komisaris independen dan presiden komisaris, laba bersih perusahaan, jumlah aset perusahaan, total utang, jumlah ekuitas, aset tetap bersih, nilai pasar saham dan nilai buku saham.

#### 3.2.2. Populasi dan Sampel

Menurut Sekaran (2006), populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006–2014, dengan cara membandingkan perusahaan BUMN dan swasta dengan industri yang sejenis dan memiliki ukuran yang sama atau paling mendekati. Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengumpulan sampel yang terbatas pada jenis tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan (Sekaran, 2006). Perusahaan *go public* dipilih karena perusahaan tersebut telah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan kepada publik sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan identifikasi. Kriteria pengambilan sampel antara lain sebagai berikut ini.

1. Perusahaan BUMN dan swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 – 2014;
2. Perusahaan swasta pada tahun yang sama, tergolong dalam sektor yang sama dan ukuran aset yang paling mendekati dengan perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 – 2014;
3. Perusahaan BUMN dan swasta yang menerbitkan laporan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 – 2014.
4. Perusahaan BUMN dan swasta dengan pajak penghasilan positif. Perusahaan dengan pajak penghasilan negatif dikeluarkan dari sampel karena menimbulkan distorsi pada ETR (Richardson dan Lanis, 2007; Chen, 2010).

### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.3.1 Variabel Terikat (*Dependent*)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *tax aggressiveness* (Y). Pengukuran terkait *tax aggressiveness* dilakukan dengan menggunakan proksi *effective tax rates* (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.* 2010).

#### 3.3.2 Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah koneksi politik dan *corporate governance*. *Corporate governance* dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks pengukuran yang digunakan dalam penelitian Ancella (2011). Indeks *Corporate Governance* dihitung dengan menggunakan *checklist* pertanyaan untuk mengukur keefektifan dewan komisaris dan komite audit terkait laporan dewan komisaris dan komite audit, profil dewan komisaris dan komite audit, pernyataan tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat dewan komisaris dan komite audit. Pemingkatan skor dari yang terbaik ke yang terburuk adalah sebagai berikut:

*Good* : memenuhi semua kriteria, diberi nilai 3

*Fair* : hanya memenuhi sebagian kriteria, diberi nilai 2

*Poor* : tidak memenuhi kriteria atau tidak ada informasi, diberi nilai 1

Variabel koneksi politik ini akan menggunakan dua sub variabel, yaitu: (1) aspek kepemilikan pemerintah yang dihitung melalui proporsi saham pemerintah yang dimiliki oleh perusahaan serta hubungan politik yang dimiliki oleh komisaris independen, dan (2) komisaris independen menggunakan *dummy*, dengan ketentuan jika suatu perusahaan memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang memiliki koneksi politik maka akan diberi skor *dummy* = 1, dan 0 jika sebaliknya. Fan (2007) menyatakan komisaris independen disebut memiliki koneksi politik jika memenuhi kriteria: (1) rangkap jabatan sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik; (2) rangkap jabatan sebagai pejabat pemerintah; (3) rangkap jabatan sebagai pejabat militer; dan (4) mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer.

### 3.3.3 Variabel Kontrol

#### 3.3.3.1 Size (Ukuran perusahaan)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar kecilnya perusahaan (Setyantomo, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Zimmerman (1983) menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga dengan besaran laba yang semakin besar maka akan menunjukkan tarif efektif pajak yang semakin besar juga.

#### 3.3.3.2 Leverage

*Leverage* menjelaskan hubungan antara penggunaan dana perusahaan yang diperoleh dari hutang. Perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor *et al*, 2010).

#### 3.3.3.3 Profitabilitas (ROA)

Pengukuran *effective tax rate* (ETR) dipengaruhi oleh kemampuan menghasilkan laba perusahaan, maka *effective tax rate* berbanding lurus dengan kemampuan menghasilkan laba perusahaan.

#### 3.3.3.4. Capital Intensity Ratio (CIR)

*Capital Intensity Ratio* menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan yang ditanamkan pada aset. Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio antara aset tetap bersih terhadap total aset.

#### 3.3.3.5. Growth

*Growth* perusahaan dihitung dengan menggunakan selisih aset tahun berjalan dengan aset tahun sebelumnya dibagi dengan aset sebelumnya.

#### 3.3.3.6. Market to book ratio

Market to book ratio merupakan perbandingan nilai pasar per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham.

### 3.4 Analisis Data

#### 3.4.1. Pengujian Hipotesis

Model analisis yang digunakan adalah *moderated regression analysis* (MRA) dengan persamaan sebagai berikut:

$$ETR = a_1 + b_1 \text{State\_Owned} + b_2 \text{PC\_IC} + b_3 \text{Corp Gov} + b_4 \text{Ln\_Aset} + b_5 \text{Lev} + b_6 \text{ROA} + b_7 \text{CIR} + b_8 \text{Growth} + b_9 \text{Market to book ratio} + b_{10} \text{Corp Gov} \times \text{PC\_IC}$$

Keterangan:

ETR = *effective tax rate*, merupakan proksi dari *tax aggressiveness*.

State\_Owned = koneksi politik aspek kepemilikan pemerintah

PC\_IC = koneksi politik komisaris independen

Corp Gov = Indeks *Corporate Governance*

Ln Aset = Logaritma Natural Total Aset

Lev = *Leverage*

ROA = *Return On Asset*

CIR = *Capital Intensity Ratio*

*Growth* = Tingkat pertumbuhan aset

*Market to book ratio* = nilai pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham

Corp GovxPC\_IC = Interaksi *corporate governance* dan koneksi politik komisaris independen

a = Konstanta

b<sub>1..2</sub> = Koefisien regresi

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa 175 laporan keuangan perusahaan bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2014. Selain itu menggunakan data non keuangan yang diperoleh dari Laporan Tahunan, seperti profil dewan komisaris dan presiden komisaris.

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh Laporan Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode pengamatan pada tahun 2006 hingga 2014. Jumlah sampel penelitian sebesar 175. Adapun hasil sampel pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut ini.



<b>Sampel Penelitian</b>	
<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah</b>
Perusahaan BUMN	116
Perusahaan Swasta	116
	232
Perusahaan memiliki nilai <i>Effective Tax Rate</i> negatif	
Perusahaan BUMN	24
Perusahaan Swasta	33
Total	57
Total Sampel	175

Sumber: Data diolah, 2016

## 4.2 Pengujian Hipotesis

### 4.2.1 Analisis Regresi

Pengujian hipotesis pada penelitian ini bersifat uji pengaruh variabel independen koneksi politik presiden komisaris dan komisaris independen serta *corporate governance* terhadap variabel dependen yakni *tax aggressiveness* yang menggunakan proksi *effective tax rate* (ETR). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas perusahaan, *capital intensity ratio* (CIR), *growth*, dan *market to book ratio* serta variabel interaksi *corporate governance* dan komisaris independen. Analisis menggunakan *moderated regression analysis* (MRA). Regresi dilakukan dengan menggunakan model penelitian sebagai berikut:

$$ETR = a_1 + b_1 \text{State\_Owned} + b_2 \text{PC\_IC} + b_3 \text{Corp Gov} + b_4 \text{Ln\_Aset} + b_5 \text{Lev} + b_6 \text{ROA} + b_7 \text{CIR} + b_8 \text{Growth} + b_9 \text{Market to book ratio} + b_{10} \text{Corp GovxPC\_IC}$$

Keterangan:

ETR = *effective tax rate*, merupakan proksi dari *tax aggressiveness*.

State\_Owned = koneksi politik aspek kepemilikan pemerintah

PC\_IC = koneksi politik komisaris independen

Corp Gov = Indeks *Corporate governance*

Ln Aset = Logaritma Natural Total Aset

Lev = *Leverage*

ROA = *Return On Assets*

CIR = *Capital Intensity Ratio*

Growth = Tingkat pertumbuhan aset

Market to book ratio = nilai pasar per lembar saham dibagi nilai buku per lembar saham

Corp GovxPC\_IC = Interaksi *corporate governance* dan koneksi politik komisaris independen

a = Konstanta

b<sub>1..</sub> = Koefisien regresi

Tabel berikut menunjukkan hasil uji regresi dalam penelitian ini. Model penelitian di atas terdiri dari tiga regresi. Regresi pertama merupakan regresi atas variabel dependen *tax aggressiveness* yang dihitung dengan menggunakan *effective tax rates* dan tiga variabel independen koneksi politik, baik dari aspek kepemilikan pemerintah maupun komisaris independen, dan *corporate governance*. Regresi kedua merupakan regresi atas *tax aggressiveness* yang dihitung dengan menggunakan *effective tax rates* dan tiga variabel independen koneksi politik, baik dari aspek kepemilikan pemerintah maupun komisaris independen, dan *corporate governance* serta variabel kontrol yang terdiri dari aset, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio*, *growth* perusahaan, dan *market to book ratio*. Regresi ketiga merupakan regresi atas *tax aggressiveness* yang dihitung dengan menggunakan *effective tax rates* dan tiga variabel independen koneksi politik, baik dari aspek kepemilikan pemerintah maupun komisaris independen, dan *corporate governance*, variabel kontrol yang terdiri dari aset, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio*, *growth* perusahaan, dan *market to book ratio* ditambah dengan variabel interaksi *corporate governance* dan koneksi politik dari aspek komisaris independen.

Hasil analisis regresi berganda pada model penelitian diperoleh nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,393 atau 39,3%. Hasil ini mengindikasikan variabilitas variabel independen yang terdiri dari koneksi politik, baik dari aspek kepemilikan pemerintah maupun komisaris independen dan *corporate governance* serta enam variabel kontrol yang terdiri dari ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio*, *growth* perusahaan, dan *market to book ratio* serta variabel interaksi *corporate governance* dan komisaris independen mampu menjelaskan sebanyak 39,3%. Sementara, sisanya 60,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ikut terobservasi. Pada regresi pertama nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 14,6%, kemudian dengan menambahkan variabel kontrol nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* berubah menjadi 39,7%.

Tabel menunjukkan bahwa variabel yang signifikan mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah koneksi politik dari komisaris independen, *leverage*, *capital intensity ratio*, dan *market to book ratio* dan aset perusahaan. Pada regresi pertama yang menyertakan variabel dependen dan variabel independen, hasilnya menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu koneksi politik, baik dari aspek kepemilikan pemerintah maupun komisaris independen dan *corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Pada regresi kedua dengan melibatkan variabel dependen dan variabel independen dengan ditambah dengan variabel kontrol, hasilnya menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* adalah koneksi politik dari aspek komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, serta profitabilitas.

**Hasil Uji Regresi Model Penelitian**

Variabel	1	2	3	Kesimpulan
Intersept	0.000* (0.519)	0.001* (0.399)	0.354 (0.353)	
State_Owned	0.005* (0.066)	0.358 (0.019)	0.355 (0.020)	
PC_IC	0.006* (0.050)	0.004* (0.046)	0.007* (0.047)	H <sub>1</sub> diterima
Corp Gov	0.008* (0.367)	0.342 (0.128)	0.844 (0.079)	H <sub>2</sub> ditolak
Ln_Aset		0.703 (-0.003)	0.737 (-0.003)	
Lev		0.000* (0.140)	0.000* (0.014)	
ROA		0.543 (-0.015)	0.554 (-0.015)	
CIR		0.000* (-0.169)	0.000* (-0.168)	
Growth		0.101 (0.023)	0.103 (0.023)	
Market to book ratio		0.004 (0.005)	0.004 (0.023)	
Corp Gov*PC_IC			0.899 (-0.056)	H <sub>3</sub> ditolak
Adj R Square	0.146	0.397	0.393	
F statistic	10.925*	13.732*	12.286*	

ETR = Effective Tax Rate;

State\_Owned = Hubungan Politik Aspek Kepemilikan Pemerintah

PC\_IC = Hubungan Politik Komisaris Independen

Corp Gov = Corporate Governance; Ln\_Aset = Logaritma Natural Aset

DER = Debt Equity Ratio; ROA = Return on Asset;

CIR = Capital Intensity Ratio;

Growth = Tingkat pertumbuhan aset

Market to book ratio = nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku

State\_Owned\*PC\_IC = Interaksi Hubungan Politik Aspek Pemerintah dan Komisaris Independen

Corp Gov\*PC\_IC = Interaksi Corporate Governance dan Komisaris Independen

---

Sumber: Data Diolah, 2016

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koneksi politik dari aspek komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* diterima pada model ini. Sementara itu variabel *corporate governance*, berpengaruh negatif pada *tax aggressiveness* meskipun hasilnya tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* ditolak. Adanya *corporate governance* yang efektif serta adanya pihak komisaris independen yang berafiliasi politik pada perusahaan BUMN akan semakin membuat perusahaan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dan menghindari praktek penghindaran perpajakan. Interaksi antara kedua variabel itu diharapkan akan memperkuat pengaruh negatif pada *tax aggressiveness* pada perusahaan BUMN. Hasil pengujian menunjukkan bahwa interaksi kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan. Hal ini berarti hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pengaruh negatif corporate governance terhadap *tax aggressiveness* akan lebih kuat pada perusahaan dengan komisaris independen yang terkoneksi politik ditolak.

#### 4.3. Pembahasan Hasil

Penelitian ini menguji model regresi dengan variabel dependen adalah *tax aggressiveness* yang diprosikan dengan *effective tax ratio* dan variabel independennya adalah pengaruh politik dari aspek kepemilikan dengan kontrol utama pemerintah, pengaruh politik dari aspek komisaris independen, dan variabel *corporate governance* dengan menggunakan indeks Hermawan (2009). Variabel kontrol yang digunakan *size*, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio*, dan *growth* perusahaan, dan *market to book ratio*. Model ini juga menambahkan variabel interaksi antara *corporate governance* dan aspek kepemilikan dengan pengaruh politik dari aspek dewan komisaris.

##### 4.3.1. Pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*

Hasil pengujian model regresi membuktikan secara empiris bahwa pengaruh politik dari aspek kepemilikan dengan kontrol utama pemerintah berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari *tax aggressiveness*. Sementara itu, pengaruh koneksi politik dari sisi komisaris independen terhadap *tax aggressiveness* memperlihatkan hasil yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* diterima. Temuan ini konsisten dengan studi empiris sebelumnya yaitu Zhang (2012) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Hasil ini bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness* (Adhikari, 2006; Richter *et al.*, 2009; Brown *et al.*, 2014; Kim and Zhang, 2015).

##### 4.3.2. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness*

Hasil pengujian model regresi membuktikan secara empiris bahwa pengaruh *corporate governance* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari *tax aggressiveness*. Hasil model penelitian menunjukkan nilai probabilitas (sig) untuk *corporate governance* sebesar 0,84 yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05 atau 5%.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness*. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sabli dan Noor (2008) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dengan *tax aggressiveness* dalam penelitiannya di negara berkembang lainnya, yaitu Malaysia. Meskipun begitu, jika dilihat dari arahnya, *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Beberapa penelitian lain seperti Sartori (2010); Friese, Link dan Mayer (2006); Chen dan Chu (2010); Bovi (2005); Chai dan Liu; Kim, Li dan Li (2010); Ralf dan Chatelain (2010) menunjukkan adanya pengaruh negatif *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness*. Sabli dan Noor (2008) menyebutkan bahwa penerapan

*corporate governance* di negara-negara berkembang kebanyakan hanya untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

#### 4.3.3. Pengaruh interaksi *corporate governance* dan koneksi politik komisaris independen

Hasil pengujian model regresi membuktikan secara empiris bahwa interaksi antara *corporate governance* dengan dewan komisaris yang terhubung politik memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *effective tax rate* yang merupakan proksi dari *tax aggressiveness*. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (sig) tingkat signifikansi interaksi sebesar 0,899, yang lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05 atau 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya *corporate governance* yang efektif ditambah dengan adanya pengaruh politik dari dewan komisaris dapat membuat perusahaan menaati peraturan perpajakan dan menghindari praktek penghindaran pajak tidak dapat dibuktikan. Hal ini berarti hipotesis ketiga dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pengaruh negatif koneksi politik terhadap *tax aggressiveness* akan lebih kuat pada perusahaan dengan *corporate governance* yang efektif serta komisaris independen yang mempunyai koneksi politik ditolak.

#### 4.3.4. Pengaruh variabel kontrol terhadap *tax aggressiveness*

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *size* (ukuran perusahaan), *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio* dan *growth* perusahaan, dan *market to book ratio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* adalah variabel *leverage*, *capital intensity ratio* (CIR) dan *market to book ratio*. Sementara, variabel kontrol lainnya yaitu *size*, profitabilitas, dan *growth* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

## 5. SIMPULAN

Hasil dari pengujian dan analisis hipotesis yang telah dilakukan dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan merupakan penyajian singkat mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Sebagai penutup dari penelitian ini akan penulis ambil beberapa kesimpulan, keterbatasan dan saran.

### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan *corporate governance* terhadap *tax aggressiveness* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2014. Faktor lain yang diduga berpengaruh dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel kontrol, antara lain ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio*, *growth* perusahaan, dan *market to book ratio*.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi politik, khususnya pada aspek komisaris independen, berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat koneksi politik, komisaris independen dapat tetap bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi kepada negara melalui setoran pajak yang besar. Mereka tidak berusaha memanfaatkan koneksi politik yang mereka miliki untuk mengurangi beban pajak terhadap perusahaan mereka. Dengan demikian, terdapat *bureaucratic incentive effect* pada kasus yang terjadi di negara Indonesia.

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa koneksi politik *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*, meskipun hasil pengujian statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan melalui *corporate governance* yang berjalan dengan baik akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para *stakeholders* termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif serta menaati peraturan pajak yang berlaku yang terlihat dengan tingkat *tax aggressiveness* yang rendah seiring dengan *corporate governance* yang baik.

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah *size* (ukuran perusahaan), *leverage*, profitabilitas, *capital intensity ratio* dan *growth* perusahaan, dan *market to book ratio*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kontrol yang berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness* adalah variabel *leverage*, *capital intensity ratio* (CIR) dan *market to book ratio*. Sementara, variabel kontrol lainnya yaitu *size* (ukuran perusahaan), profitabilitas, dan *growth* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

### 5.2 Keterbatasan

Pada penelitian ini proksi *tax aggressiveness* hanya menggunakan perhitungan *effective tax rate*, sementara proksi *tax aggressiveness* yang lain seperti *book tax difference* (BTD) tidak digunakan dalam penelitian ini. Sementara itu, untuk proksi koneksi politik, hanya digunakan koneksi politik pada posisi

komisaris independen, sementara koneksi politik untuk posisi dewan direksi tidak digunakan dalam penelitian ini.

### 5.3 Saran

Penelitian ini hanya menggunakan data kuantitatif, untuk penelitian selanjutnya dapat dikombinasikan dengan data kualitatif maupun metode pencarian data yang lain, misalnya wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris, khususnya komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Pada penelitian selanjutnya dapat diteliti apa yang memotivasi mereka untuk melakukan hal ini, misalnya faktor popularitas di media atau keinginan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan yang lebih strategis. Penelitian kali ini juga hanya menyertakan koneksi politik pada komisaris independen saja, tetapi tidak menyertakan koneksi politik di posisi dewan direksi. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hal ini, khususnya direksi pada BUMN. Pada kasus di negara Indonesia, direktur BUMN merupakan posisi strategis yang dapat digunakan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Setidaknya, pada kabinet pemerintahan di Indonesia tahun 2014-2019 terdapat 3 (tiga) orang mantan direktur utama BUMN yang masuk ke dalam pemerintahan sebagai menteri.

### 5.4 Implikasi

Implikasi teoritis penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya seperti Zhang (2012) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*. Ini menunjukkan bahwa terjadi *bureaucratic incentive effect* di negara Indonesia. Pendapat ini menyatakan bahwa eksekutif memiliki motivasi untuk berkontribusi secara maksimal kepada negara dengan pembayaran pajak yang besar kepada negara. Motivasi ini timbul karena adanya keinginan untuk mempertahankan ataupun meningkatkan jabatan politik yang ada saat ini melalui kontribusi bagi pemerintah, dalam hal ini setoran pajak di mana itu menjadi salah satu evaluasi yang diberikan pemerintah. Selain itu, juga adanya citra positif yang ditimbulkan karena adanya sorotan media sebagai pembayar pajak yang patuh dan berkontribusi besar pada negara. Hal ini akan berdampak terhadap jabatan politiknya saat ini.

Implikasi praktis dari penelitian ini bagi pemerintah dapat digunakan sebagai acuan dalam menyeleksi jabatan untuk mengisi posisi dewan komisaris, khususnya di perusahaan BUMN. Pemerintah tidak hanya berpedoman mengenai koneksi politik yang dimiliki saja namun juga memperhatikan keahlian dan kompetensi orang yang mengisi posisi tersebut yang diharapkan berkontribusi maksimal bagi negara, khususnya dalam memberikan setoran pajak.

## 6. REFERENSI

- [1] Adhikari, A., Derashid, C., Zhang, H. 2006. Public Policy, Political Connections, and Effective Rate Rates: longitudinal evidence from Malaysia. *Journal Accounting Public Policy*, 25: 554–595.
- [2] Annisa, N.A., Kurniasih, L. 2012. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(2): 95-189.
- [3] Arinda, E.P. 2015. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Manajemen Laba pada Industri Perbankan di Indonesia. *Penelitian Tidak Dipublikasikan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret.
- [4] Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Larcker, D.F. 2012. The Incentives for Tax Planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53: 391–411.
- [5] Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. 2010. Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95: 41-61.
- [6] Chen, X., Harford, J., Li, K. 2007. Monitoring: Which institutions matter? *Journal of Financial Economics*, 86: 279-305.
- [7] Chia, J., Liaoa, J. dan Chen, X. 2015. Political Connected CEOs and Earnings Management: Evidence from China. *Journal of Economic Literature* 92: 312-341
- [8] Christina, I. 2014. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Perusahaan Telekomunikasi Milik Pemerintah (BUMN) dengan Perusahaan Telekomunikasi Swasta yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. *Penelitian Tidak Dipublikasikan*. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Maranatha.
- [9] Demircuc-Kunt, A., Huizinza, H. 2001. The Taxation of Domestic and Foreign Banking. *Journal of Public Economics* 79 (3): 429–453.
- [10] Desai, M., Dharmapala, D. 2006. Corporate Tax Avoidance and High-powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79: 145–179.

- [11] Dewi, K.S., Prasetiono. 2012. Analisis Pengaruh ROA, NPM, DER, dan Size terhadap Praktik Perataan Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Diponegoro Journal of Management* 1 (2): 172-180.
- [12] Ding, Y., Zhang, H. dan Zhang, J. 2007. Private vs.State Ownership and Earnings Management: Evidence from Chinese Listed Companies. *Corporate Governance: An International Review* 15 (2): 223-238.
- [13] Dyreng, S.D., Hanlon, M., Maydew, E.L. 2008. Long-run Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review* 83: 61-82.
- [14] Dyreng, S.D., Hanlon, M., Maydew, E.L. 2010. The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review* 85: 1163-1189.
- [15] Egger, P., Eggert, W., Winner, H. 2010. Saving Taxes through Foreign Plant Ownership. *Journal International Economics* 81: 99-108.
- [16] Faccio, M., Masulis, R.W., McConnell, J.J. 2006. Political Connections and Corporate Bailouts. *The Journal of Finance* 61: 2597-2635.
- [17] Faccio, M. 2006. Politically Connected Firms. *The American Economic Review* 96 (1): 369-386.
- [18] Fan, Joseph dan Wong, T. J. 2002. Corporate Ownership Structure and the Informativeness of Accounting Earnings in East Asia. *Journal of Accounting and Economics* 33 (9), 401-425.
- [19] Fan, J.P.H., Wong, T.J., Zhang, T., 2007. Politically Connected CEOs, Corporate Governance, and Post-IPO Performance of China's Newly Partially Privatized Firms. *Journal of Financial Economics* 84: 330-357.
- [20] Fisman, R. 2001. Estimating the Value of Political Connections. *American Economic Review* 91: 1095-1102.
- [21] Frank, M., L. Lynch, & S. Rego. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84 (2): 467-496.
- [22] Francis, B. B., Hasan, I., dan Sun, X. 2009. Political Connections and the Process of Going Public: Evidence from China. *Journal of International Money and Finance* 28(4): 696-719.
- [23] Gomes, A. 2000. Going Public without Governance: Managerial Reputation Effects. *Journal of Finance* 55 (2): 615-646.
- [24] Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [25] Giroud, X., Lee, J., Mullins, W. 2013. Political Connections and Firm Value: Evidence from a Regression Discontinuity Design. *Working paper*.
- [26] Guna, Welvin I, Herawaty. 2010. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor lainnya terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 12 (1): 53-68.
- [27] Hanlon, M., Heitzman, S. 2010. A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics* 50: 127-178.
- [28] Hanum, H. R., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rates. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2): 1-10.
- [29] Healy, P., dan Wahlen J. 1999. A Review of The Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizon* 13(4): 365-383.
- [30] Hermawan, A. A. 2011. The Influence of Effective Board of Commissioners and Audit Committee on the Informativeness of Earnings: Evidence from Indonesian Listed Firms. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance* 2(1): 8-42
- [31] Huizinga, H., Nicodeme, G. 2006. Foreign Ownership and Corporate Income Taxation: An Empirical Evaluation. *Europe Economics Review* 50 (5): 1223-1244.
- [32] Huseynov, F., Klamm, B.K. 2012. Tax Avoidance, Tax Management and Corporate Social Responsibility. *Journal Corporate Finance* 18 (4): 804-827.
- [33] Ibrahim, Y. 2010. Firm Characteristic and The Choice Between Straight Debt and Convertible Debt Among Malaysian Listed Companies. *International Journal of Business and Management*, 5 (11): 74-83
- [34] Kamal, M. 2011. Konsep Corporate Governance di Indonesia: Kajian atas Kode Corporate Governance. *Jurnal Manajemen Teknologi* 10 (2): 145-161.
- [35] Kim, Chansog (Francis), and Liandong Zhang. 2013. Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Working Paper*. City University of Hong Kong.

- [36] Lanis, R., Richardson, G. 2011. The Effect of Board of Director Composition on Corporate Tax Aggressiveness. *Journal Accounting Public Policy* 30 (1): 50–70.
- [37] Lanis, R., Richardson, G. 2012. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal Accounting Public Policy* 31: 86–108.
- [38] Leuz, C., and F. Oberholzer-Gee. 2006. Political Relationships, Global Financing, and Corporate Transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics* 81 (2): 411–439.
- [39] Li, C., Wang, Y., Wu, L. dan Xiao, J. Z. 2013. Political Connections and Tax-Induced Earnings Management: Evidence from China. *The European Journal of Finance* 20: 1-19.
- [40] Minnick, K., Noga, T. 2010. Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal Corporate Finance* 16 (5): 703–718.
- [41] Noor, R.M. , Syazwani M.F., and Azam, M. 2010. Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies, *International Journal of Trade, Economics and Finance* 1 (2): 189-193.
- [42] Prakoso, K.B. 2014. Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi* 14.
- [43] Preuss, L., 2010. Tax Avoidance and Corporate Social Responsibility: You Can't Do or Can You? *Journal Corporate Governance* 10 (4): 365–385.
- [44] Primasari, R. 2013. Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance terhadap Audit Fee. *Tesis tidak dipublikasikan*. Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- [45] Purwoto, L. 2011. Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen*. Universitas Gadjah Mada
- [46] Richter, B., Samphantharak, K., Timmons, J. 2009. Lobbying and Taxes. *American Journal of Political Science* 53: 893-909.
- [47] Sabli, N., Noor, R.M. 2012. International Conference on Business and Economic Research. *Penelitian Tidak Dipublikasikan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teknologi Mara.
- [48] Scott, W.R. 2009. *Financial Accounting Theory*, 5 th Edition. Toronto: Pearson Prentice Hall.
- [49] Sekaran, U. 2006. *Research Method for Business, Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- [50] Shleifer, A. 1998. State Versus Private Ownership. *Journal of Economic Perspective* 12 (4): 133–150.
- [51] Shleifer, A. and Vishny, R. W. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *Journal of Political Economy* 94 (3): 461–488.
- [52] Sotartagam, R.D.Q. 2015. Analisis Pengaruh Political Connection terhadap Nilai Perusahaan. *Tesis tidak dipublikasikan*. Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
- [53] Thomas, S.K.. 2006. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 8 (1): 1-9.
- [54] Ula, Marisatul. 2011. Perbandingan Kinerja BUMN dan BUMS yang Masuk di Jakarta Islamic Index. *Penelitian Tidak Dipublikasikan*. Jurusan Keuangan Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- [55] Vernon, J.R. 2000. Information Asymmetry and Earnings Management: Some Evidence. *Review of Quantitative Finance and Accounting* 15 (4): 325-347.
- [56] Wang, L. dan Yung, K. 2011. Do State Enterprises Manage Earnings more than Privately Owned Firms? The Case of China. *Journal of Business Finance & Accounting* 38 (7): 794-812.
- [57] Wibowo, A.T. 2013. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara Perusahaan Farmasi Milik Pemerintah (BUMN) dengan Perusahaan Farmasi Swasta di Bursa Efek Indonesia. *Penelitian Tidak Dipublikasikan*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- [58] Zhang, H., Li, W., Jian, M. 2012. How Does State Ownership Affect Tax Avoidance? Evidence from China. *Working paper*. School of Accountancy, Singapore Management University.